



Dampak Konflik Maritim terhadap Stabilitas Keamanan Laut di Asia Tenggara

Salsabila Kamaluddin

Universitas Hasanuddin, Indonesia

Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar, 90245, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

Korespondensi penulis: salsabilanaadji@gmail.com*

Abstract. Maritime conflicts in Southeast Asia place regional stability at great challenge, especially due to the importance of these waters as international transport routes. Claims for overlapping maritime areas, illegal activities such as trespassing and unregulated copyright fishing, in particular increased geopolitical tensions in the South China Sea, have created a complex maritime security environment. These disputes not only affect state jurisdictional and maritime sovereignty, but also affect regional economic activities, including trade and marine tourism. This study uses a qualitative approach in literature research to examine the effects of these various topics on maritime stability and efforts to address legal channels and diplomatic conflicts. Using conflict theory, this study highlights the importance of regional co-operation, adherence to the International Sea Council, and the importance of adaptive security strategies as a step in mitigation. It also focuses on the relationship with maritime security with other important sectors such as logistics, energy and tourism, highlighting the need for collective action between countries in Southeast Asia.

Keywords: Maritime conflict; Maritime security; Regional cooperation; South China Sea; Southeast Asia

Abstrak. Konflik maritim di Asia Tenggara menempatkan stabilitas regional pada tantangan besar, terutama karena pentingnya air ini sebagai rute transportasi internasional. Klaim untuk daerah laut yang tumpang tindih, kegiatan ilegal seperti pelanggaran dan penangkapan ikan hak cipta yang tidak diatur, khususnya peningkatan ketegangan geopolitik di Laut Cina Selatan, telah menciptakan lingkungan keamanan maritim yang kompleks. Perselisihan ini tidak hanya mempengaruhi kedaulatan yurisdiksi negara dan maritim, tetapi juga mempengaruhi kegiatan ekonomi regional, termasuk perdagangan dan pariwisata kelautan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian literatur untuk menguji efek dari berbagai topik ini pada stabilitas maritim dan upaya untuk menangani saluran hukum dan konflik diplomatik. Dengan menggunakan teori konflik, penelitian ini menyoroti pentingnya kerja sama regional, kepatuhan terhadap Dewan Laut Internasional, dan pentingnya strategi keamanan adaptif sebagai langkah dalam mengurangi. Ini juga berfokus pada hubungan dengan keamanan maritim dengan sektor-sektor penting lainnya seperti logistik, energi dan pariwisata, menyoroti perlunya tindakan kolektif antara negara-negara di Asia Tenggara.

Kata kunci: Asia Tenggara; Keamanan maritim; Kerjasama regional; Konflik maritim; Laut Cina Selatan

1. LATAR BELAKANG

Dinamika keamanan di laut di wilayah Asia Tenggara membutuhkan perhatian mendalam dari ASEAN. Asia Tenggara memiliki kepentingan strategis yang krusial, seperti yang terlihat dari perairannya, yang kini berfungsi sebagai Jalur Pelayaran Internasional. Namun, nilai strategis ini juga mengindikasikan bahwa wilayah ini menghadapi berbagai tantangan. Ancaman terhadap keamanan semakin meningkat, terutama di area-area seperti pembajakan, praktik penangkapan ikan ilegal, kejahatan terorganisir lintas negara yang tidak dilaporkan dan tidak teratur, serta sengketa batas maritim (Zulhatta et al., 2022, p. 197).

Dinamika keamanan laut di Asia Tenggara menuntut perhatian ASEAN karena kawasan ini menghadapi ancaman serius seperti pembajakan, penangkapan ikan ilegal, kejahatan lintas negara, dan sengketa maritim akibat nilai strategis jalur pelayarannya.

Beragam perselisihan mengenai batas laut menjadi hambatan yang rumit bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia, termasuk dampak yang melampaui wilayah kedaulatan. Negara-negara di Asia Tenggara berhadapan dengan sejumlah tantangan yang berkaitan dengan perselisihan batas laut yang menyangkut pengakuan kedaulatan wilayah, hak untuk memanfaatkan sumber daya, serta kekuasaan yurisdiksi di perairan di sekitarnya (Nadzri et al., 2025, p. 631). Perselisihan mengenai perbatasan laut di Asia Tenggara menghasilkan tantangan rumit yang berkaitan dengan pengakuan kedaulatan, penggunaan sumber daya, dan wewenang maritim yang memiliki dampak melebihi batas negara.

Kawasan ini sangat mengandalkan lautannya sebagai sumber pendapatan, penghubung penting untuk transportasi antar daerah, dan bagian fundamental dari warisan budayanya. Meskipun meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan menyita perhatian luar regional, area maritim yang lebih luas di Asia Tenggara adalah lingkungan yang kompleks penuh risiko, di mana banyak ancaman lain mengintai dan menimbulkan bahaya bagi berbagai komunitas yang terlibat dalam sektor maritim. Memahami dan mengurai kerumitan ini menimbulkan kebutuhan untuk lebih mengenali beragam ancaman baru serta yang berkelanjutan yang dihadapi oleh Asia Tenggara saat ini. Dalam ranah maritim, tantangan awal dalam keamanan selama periode ini mencakup arus migran ilegal yang berusaha melarikan diri dari konflik di IndoChina, serta perdagangan heroin lintas perbatasan dari Segitiga Emas menuju selatan di sepanjang Rute Maritim Barat, termasuk Laut Andaman dan Selat Malaka. Pembajakan dan perampokan bersenjata semakin sering dan semakin brutal, terkonsentrasi di Selat Malaka yang semakin ramai dan Laut Sulu/Sulawesi (Edward et al, 2023). Laut berperan krusial bagi Asia Tenggara dalam aspek ekonomi, budaya, dan lalu lintas, tetapi wilayah ini menghadapi berbagai tantangan rumit seperti imigrasi ilegal, perdagangan obat terlarang, dan tindakan pembajakan yang semakin ganas, terutama di Selat Malaka dan Laut Sulu/Sulawesi.

Kompleksitas penetapan perbatasan laut menjadi lebih rumit karena Asia Tenggara memiliki dua negara kepulauan terbesar di dunia, yakni Indonesia dan Filipina, serta pengaruhnya terhadap hak-hak maritim dan hak-hak negara lain di kawasan tersebut. Perselisihan mengenai batas laut di Asia Tenggara menimbulkan berbagai tantangan yang berkaitan dengan pengakuan kedaulatan, pemanfaatan sumber daya, dan kekuasaan maritim yang dampaknya melampaui batas negara. Kegagalan dalam menentukan batas tidak selalu menunjukkan adanya ketegangan yang penuh masalah antar negara. Terkadang, penetapan

batas pada satu bagian bisa tertunda karena bergantung pada penentuan batas antara negara-negara yang berbeda, seperti yang dialami oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura di bagian timur Selat Malaka (lihat kontribusi Leonardo Bernard). Ketika konflik mengenai batas laut bercampur dengan sengketa kedaulatan, mencapai kesepakatan yang jelas mengenai zona maritim menjadi tidak mungkin hingga sengketa kedaulatan itu diselesaikan (Jenne., 2023, p. 3). Penentuan wilayah laut di Asia Tenggara menjadi semakin kompleks akibat status sebagai negara kepulauan serta sengketa terkait kedaulatan yang saling berhubungan. Karena itu, penyelesaian batas laut sering tertunda dan sulit untuk diraih tanpa menyelesaikan terlebih dahulu konflik mendasar antara negara-negara yang bersangkutan.

Istilah mengenai keamanan maritim tidak dijelaskan dengan rinci, namun dinyatakan bahwa ancaman terhadap perdamaian dan keamanan global yang muncul dari perairan harus menjadi fokus, terutama terkait aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan tanpa izin, perdagangan manusia, tráfico narkoba, dan kejahatan terorganisir. Semua ancaman yang ada memengaruhi stabilitas, keamanan, dan kenyamanan di wilayah Indo-Pasifik. Konsep keamanan maritim juga melibatkan aspek militer yang dapat menyebabkan tindakan kekerasan. Persaingan di kawasan Indo-Pasifik, yang mencakup area Samudra Pasifik, termasuk pantai barat Afrika, terjadi akibat perubahan dalam keseimbangan kekuatan global. Dalam laporan Global Trends 2030, diprediksi Asia akan melampaui Amerika Utara dan Eropa dalam aspek kekuatan global, yang ditentukan oleh pendapatan nasional, populasi, investasi dalam teknologi, dan pengeluaran militer (Dachi et al., 2023, p. 3). Keamanan laut di wilayah Indo-Pasifik melingkupi tantangan non-konvensional seperti tindakan ilegal dan kriminalitas terstruktur, serta fluktuasi militer yang diakibatkan oleh pergeseran keseimbangan kekuatan dunia dan bertambahnya pengaruh dari Asia.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis menyeluruh mengenai dinamika keamanan laut di wilayah Asia Tenggara, dengan menekankan berbagai elemen yang memengaruhi kerumitan ancaman dan usaha bersama untuk mencapai kestabilan di tingkat regional. Daerah ini memiliki nilai strategis yang tinggi karena perairannya berfungsi sebagai Rute Pelayaran Internasional, tetapi juga menjadi tempat yang rentan bagi berbagai jenis kriminalitas lintas negara, sengketa laut, serta ketegangan akibat perebutan hak wilayah. Kajian ini sangat penting untuk memahami bagaimana negara-negara di Asia Tenggara dan ASEAN sebagai sebuah organisasi regional menghadapi tantangan-tantangan ini melalui kebijakan keamanan dan kolaborasi maritim. Aspek baru dalam penelitian ini adalah penekanan pada hubungan antara konflik maritim dan dampaknya terhadap sektor-sektor penting lainnya,

khususnya pariwisata laut, yang mulai terpengaruh oleh ketidakpastian dan ancaman keamanan di kawasan Asia Tenggara.

2. KAJIAN TEORITIS

Konflik Maritim

Manajemen konflik yang berkaitan dengan laut adalah pengaturan permasalahan yang muncul di lingkungan maritim. Proses ini mencakup penegakan, penyelesaian, serta penghindaran dari konflik. Khususnya dalam konteks hukum perang di laut, manajemen konflik maritim menghasilkan mekanisme yang kemudian diterapkan di area hukum serta diplomasi internasional lainnya. Konflik di perairan umumnya muncul karena adanya klaim tumpang tindih atas wilayah dan kepentingan strategis dari negara-negara yang terlibat. Dalam konteks ini, langkah-langkah militer dan diplomatik yang diambil oleh Indonesia mencerminkan upaya untuk mempertahankan kedaulatan serta kestabilan ekonomi di wilayah tersebut. Keberadaan Bakamla RI sebagai pengawal utama hukum mencerminkan tindakan konkret untuk menyeimbangkan pendekatan militer dan diplomasi dalam menghadapi konflik (Sicking., 2017, p. 2) Pengelolaan konflik laut meliputi tindakan penegakan hukum, kegiatan diplomatik, serta aspek militer untuk menyelesaikan masalah wilayah perairan, contohnya dilakukan Indonesia melalui peran Bakamla RI..

Keamanan di lautan mencakup upaya menyeluruh untuk melindungi wilayah maritim suatu negara, yang mencakup hal-hal penting seperti perairan, infrastruktur kritis, aktivitas ekonomi, kondisi laut, serta kesejahteraan masyarakat pesisir. Ini mengindikasikan bahwa keamanan laut tidak hanya fokus pada mempertahankan kedaulatan wilayah perairan dari ancaman tradisional seperti konflik militer atau pelanggaran batas, tetapi juga mencakup ancaman yang tidak biasa dan bersifat lintas batas, termasuk perompakan, penangkapan ikan ilegal, perdagangan barang terlarang, perdagangan manusia, pencemaran lingkungan, dan bencana alam (Yani, et al., 2017, p.65.) Keamanan laut mencakup perlindungan menyeluruh atas wilayah dan sumber daya maritim dari ancaman tradisional maupun non-tradisional, termasuk konflik militer, perompakan, aktivitas ilegal lintas batas, dan bencana alam.

Kegiatan maritim, seperti pelayaran, perdagangan, dan penangkapan ikan, memainkan peran krusial dalam masyarakat selama zaman pertengahan hingga awal modern. Dampak dari aktivitas ini, terutama dalam penghindaran konflik seperti negosiasi, terutama bagi komunitas yang tinggal di pesisir, mendorong otoritas publik—termasuk kota, penguasa, dan negara—untuk memperluas kekuasaan mereka melampaui batas wilayah pesisir mereka. Ciri transnasional yang selalu ada dalam upaya-upaya ini, beserta konflik yang dihasilkannya,

menjadikannya topik yang sangat menarik untuk dianalisis dalam kajian sejarah hukum diplomatik dan internasional. Sudut pandang ini membuka peluang bagi kita untuk berpaling dari pendekatan yang lebih tradisional, yang melihat aktivitas maritim dalam konteks sejarah sosial ekonomi dan militer. Topik ini akan mengeksplorasi pengelolaan konflik maritim, yaitu cara-cara untuk mengatur permasalahan yang berkaitan dengan laut. Pengelolaan konflik maritim mencakup penegakan konflik (seperti perang laut, perompakan, pembajakan, dan blokade), penyelesaian konflik (meliputi proses peradilan dan administrasi formal serta metode informal atau privat), dan penghindaran konflik (melalui negosiasi) (Sicking, 2017, p. 3). Kegiatan maritim selama abad pertengahan dan permulaan era modern mendorong berkembangnya kekuasaan di luar batas territorial berkat karakter transnasional dan risiko konflik yang ada, sehingga menjadikannya area studi yang signifikan dalam sejarah hukum dan diplomasi global, terutama dalam mengelola konflik di lautan melalui penegakan hukum, penyelesaian sengketa, serta pencegahan perselisihan.

Kegiatan maritim selama abad pertengahan dan permulaan era modern mendorong berkembangnya kekuasaan di luar batas territorial berkat karakter transnasional dan risiko konflik yang ada, sehingga menjadikannya area studi yang signifikan dalam sejarah hukum dan diplomasi global, terutama dalam mengelola konflik di lautan melalui penegakan hukum, penyelesaian sengketa, serta pencegahan perselisihan.

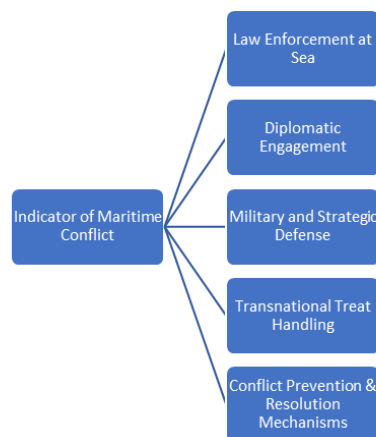


Figure 1. Indicators of *Maritime Conflict*

Keamanan Maritim

Kegiatan maritim selama abad pertengahan dan permulaan era modern mendorong berkembangnya kekuasaan di luar batas territorial berkat karakter transnasional dan risiko konflik yang ada, sehingga menjadikannya area studi yang signifikan dalam sejarah hukum dan diplomasi global, terutama dalam mengelola konflik di lautan melalui penegakan hukum,

penyelesaian sengketa, serta pencegahan perselisihan. Sengketa maritim internasional merujuk pada konflik yang timbul antara negara-negara terkait hak dan tanggung jawab yang terkait dengan batas maritim dan navigasi. Sengketa ini sering kali melibatkan isu-isu rumit yang terkait dengan klaim teritorial, alokasi sumber daya, dan jalur bebas kapal melalui perairan internasional (Leksikonologi, 2024). Sejak zaman pertengahan sampai awal zaman modern, usaha di bidang maritim telah memicu munculnya kekuatan yang melampaui batas negara dan menjadikannya subjek krusial dalam hukum dan diplomasi internasional. Perselisihan laut global meliputi pertikaian antar negara mengenai batasan wilayah perairan, hak untuk berlayar, klaim atas tanah, serta penggunaan sumber daya dan rute pelayaran.

Secara historis, sengketa maritim telah memainkan peran penting dalam membentuk hubungan global dan kerangka hukum. Evolusi hukum maritim, termasuk perjanjian seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS), bertujuan untuk menyediakan struktur hukum yang komprehensif untuk mengatasi sengketa ini. Memahami kerangka kerja ini sangat penting bagi negara-negara yang terlibat dalam perdagangan dan eksplorasi maritim (Leksikonologi, 2024). Sengketa di laut memiliki peranan krusial dalam membangun interaksi antarbangsa dan evolusi hukum kelautan. Struktur hukum seperti UNCLOS dirancang untuk mengatasi perselisihan laut dengan cara yang menyeluruh, khususnya untuk negara-negara yang terlibat dalam perdagangan serta penjelajahan di lautan.

Keamanan maritim telah menjadi salah satu fokus penting terbaru dalam bidang hubungan internasional. Para pelaku utama dalam kebijakan maritim, pengelolaan laut, dan keamanan global dalam sepuluh tahun terakhir, mulai mengintegrasikan keamanan maritim ke dalam agenda mereka atau mendefinisikan kembali kegiatan mereka dengan istilah tersebut. Pada tahun 2014, Inggris, Uni Eropa, dan Uni Afrika (AU) meresmikan strategi keamanan maritim yang ambisius. Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) menjadikan keamanan maritim sebagai salah satu sasaran dalam Strategi Maritim Aliansi yang dirilis pada tahun 2011. Amerika Serikat berperan sebagai pelopor dalam perkembangan ini dengan memperkenalkan Kebijakan Keamanan Maritim nasional pada tahun 2004. Selain itu, Komite Keselamatan Maritim (MSC) di bawah naungan Organisasi Maritim Internasional juga mencantumkan keamanan maritim dalam agenda tugas mereka (Bueger., 2015, p. 1). Aktivitas kelautan yang terjadi dari abad pertengahan hingga awal zaman modern telah memperkuat kekuasaan yang melampaui batas negara akibat karakter transnasional dan potensi terjadinya konflik, sehingga menjadi perhatian utama dalam sejarah hukum serta diplomasi dunia. Perselisihan maritim di tingkat internasional melibatkan konflik antara negara-negara mengenai batas laut, hak

pelayaran, klaim wilayah, dan pengaturan sumber daya, yang memerlukan penerapan hukum dan cara-cara penyelesaian konflik.

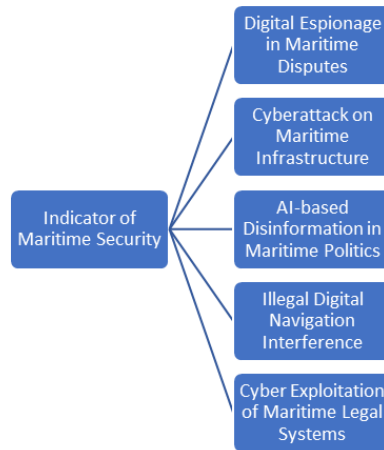


Figure 2. Indicators of *Maritime Security*

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi pengaruh konflik di laut terhadap kestabilan keamanan maritim di kawasan Asia Tenggara. Informasi dikumpulkan melalui kajian pustaka, yang mencakup jurnal ilmiah, laporan kebijakan, dan dokumen resmi dari badan internasional seperti ASEAN dan UNCLOS. Pokok bahasan utama meliputi masalah sengketa maritim, tindakan pembajakan, penangkapan ikan tanpa izin, dan ketegangan geopolitik di Laut Cina Selatan. (Valencia et al., 1999). Analisis dilaksanakan dengan menggunakan analisis isi untuk menentukan pola serta dampak strategis dari konflik terhadap keamanan wilayah. Pendekatan ini memberikan wawasan yang mendalam mengenai dinamika kawasan yang rumit dan bernuansa banyak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN



Figure 3. Map of Subnational Conflict Areas in South and South East Asia

Source: <https://usnwc.libguides.com/SouthChinaSea>

Peta ini menggambarkan area yang diperebutkan di Laut China Selatan, melibatkan berbagai klaim tumpang tindih dari sejumlah negara, termasuk Vietnam, China, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan. Perselisihan ini terfokus pada hak atas perairan yang memiliki sumber daya alam melimpah, seperti minyak, gas, dan hasil laut, serta aset strategis sebagai jalur perdagangan internasional. China mengklaim hampir seluruh area ini dengan menggunakan garis putus-putus yang dikenal sebagai "Garis Sembilan Lurus", yang mencakup sebagian besar Laut China Selatan, termasuk area penting seperti Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spratly. Klaim sepihak ini telah ditentang oleh negara-negara tetangga, memicu ketegangan geopolitik yang meningkat, termasuk peningkatan kehadiran militer dan insiden laut antara negara-negara. Selain pertikaian internasional, Asia Tenggara juga dilanda berbagai konflik subnasional yang melibatkan kelompok separatis, pemberontak, dan kelompok etnis minoritas. Di bagian selatan Filipina, Mindanao telah menjadi pusat pertempuran antara pemerintah dan kelompok separatis Muslim yang mendesak untuk mendapat otonomi atau kemerdekaan. Di selatan Thailand, provinsi seperti Pattani, Yala, dan Narathiwat mengalami pemberontakan oleh kelompok separatis Muslim melawan pemerintah pusat di Bangkok. Di Indonesia, meskipun Aceh sekarang relatif tenang setelah perjanjian damai, daerah ini memiliki sejarah panjang perjuangan untuk kemerdekaan. Sementara itu, Papua tetap menjadi wilayah konflik aktif, dengan gerakan separatis yang terus berjuang untuk kebebasan. Gabungan sengketa teritorial dan konflik internal ini menambah kerumitan dinamika politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan (LIB Guides, 2024). Peta tersebut menggambarkan kompleksitas konflik internal di Asia Tenggara yang dipicu oleh isu etnis, agama, dan tuntutan otonomi, yang memperumit stabilitas kawasan akibat ketegangan politik, perebutan wilayah, dan menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah pusat. Kondisi ini

sesuai dengan indicator of maritime conflict, terutama terkait dengan permasalahan teritorial dan politik. Permasalahan wilayah di Laut China Selatan menampilkan tanda seperti pertahanan militer dan strategi, penegakan hukum di laut, serta partisipasi diplomatik, terutama dengan meningkatnya ketegangan antara China dan negara-negara ASEAN. Di sisi lain, perselisihan internal di daerah-daerah seperti Mindanao, Aceh, Thailand Selatan, dan Papua menunjukkan dimensi penanganan ancaman transnasional serta perlunya mekanisme resolusi konflik, dikarenakan partisipasi aktor non-negara dan perjuangan separatis yang rumit. Dengan demikian, keadaan ini menggambarkan bahwa pertikaian politik dan teritorial tak hanya memperburuk hubungan internasional, tetapi juga menyulitkan usaha menjaga kestabilan lautan di kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan.



Figure 4. Asia Pasific Trade Route

Source: https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=%2fGIZekCk&id=8E62A9CE7B048013292C0A1A027B5E08994B4E5F&thid=OIP._GIZekCkGraCnhuBusS60gHaFO&mediaurl=https%3a%2f%2fmir-s3-cdn-cf.behance.net%2fproject_modules%2f1400%2f4a72ae36884601.572cdd0f100e6.jpg&cxph=989&expw=1400&q=Map+of+International+Shipping+Routes+in+Southeast+Asia++Search+Images&simid=608013039177988746&FORM=IRPRST&ck=358AC1D12549550B7BD7BE11B2FF416A&selectedIndex=3&itb=0&mode=overlay

Peta ini menunjukkan rute-rute perdagangan penting di wilayah Asia-Pasifik yang menghubungkan berbagai pusat ekonomi global, termasuk India, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, serta negara-negara di Asia Tenggara. Rute-rute laut ini berfungsi sebagai jalur krusial bagi pengangkutan barang yang diekspor dan diimpor, seperti minyak, gas, perangkat elektronik, dan bahan baku industri. Pelabuhan utama seperti Shanghai, Hong Kong, Tokyo,

Busan, Singapura, dan Jakarta memainkan peran signifikan dalam kelancaran perdagangan internasional. Area ini menjadi pusat dari jaringan pasokan global, dengan Selat Malaka dan Laut China Selatan sebagai lokasi utama yang sibuk dengan aktivitas kapal perdagangan. Namun, dibalik peran ekonominya yang signifikan, jalur perdagangan ini juga menghadapi sejumlah tantangan terkait keamanan dan kepentingan geopolitik. Persaingan antara negara besar, khususnya di Laut China Selatan, dapat menciptakan potensi konflik yang dapat merusak stabilitas di kawasan. Ketegangan ini diperumit oleh adanya klaim overlapping atas wilayah lautan dan meningkatnya aktivitas militer di area tersebut. Selain itu, ancaman yang tidak konvensional seperti pembajakan, penyelundupan, dan terorisme laut menambah kerumitan dalam menjaga keamanan maritim. Oleh sebab itu, kolaborasi regional yang kuat sangat penting untuk memastikan jalur perdagangan Asia-Pasifik tetap aman, stabil, dan dapat diakses oleh semua pihak (Olason, 2024). Peta ini menunjukkan pentingnya jalur perdagangan laut Asia-Pasifik yang strategis namun rentan terhadap konflik dan ancaman keamanan, sehingga menegaskan perlunya kolaborasi regional dan diplomasi maritim untuk menjaga stabilitas kawasan. Kondisi ini sesuai dengan indicators of maritime security, khususnya dalam pengawalan rute bisnis lintas negara di wilayah Asia-Pasifik. Jalan strategis seperti Selat Malaka dan Laut Tiongkok Selatan tidak hanya berfungsi sebagai pusat operasi komersial global, tetapi juga berisiko menjadi titik konflik akibat meningkatnya operasi militer dan ketegangan geopolitik. Ini selaras dengan indikator seperti serangan siber pada infrastruktur maritim dan gangguan navigasi digital ilegal, di mana keamanan digital pelabuhan serta sistem navigasi menjadi fokus utama dalam mempertahankan kelancaran logistik kosmopolitan. Lebih jauh, tantangan non-konvensional seperti pembajakan, penyelundupan, dan terorisme laut menunjukkan bahwa isu keamanan maritim kini tidak lagi bersifat klasik, tetapi juga memerlukan kerja sama regional yang kokoh dan respons adaptif antar sektor. Oleh karena itu, stabilitas bisnis maritim di Asia-Pasifik tidak hanya bergantung pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada ketahanan terhadap ancaman siber dan keamanan lintas batas.

Beragam konflik mengenai perbatasan maritim menghadapi tantangan yang rumit bagi negara-negara di seluruh penjuru dunia, mencakup efek yang melampaui kekuasaan perimeter. Negara-negara di Asia Tenggara menghadapi beraneka ragam halangan sehubungan dengan perdebatan pembatas ocean mereka, yang berkisar sehubungan klaim atas hak kedaulatan, hak pembuangan dana sumber daya alam, dan urusan yuridiksi di danau antar. Penelitian peristiwa ini menyelidiki perubahan konflik pembatas ocean dengan menganalisis penjelasan mendasar, kerangka acuan pedoman yang ada, dan pengaruh kontekstual dari gugatan peristiwa ini terhadap eksplorasi dana sumber daya minuman dan gas bumi di di tempat pantai terbuka

(Nadzri, et al, p. 1, 2025). Konflik perbatasan maritim di Asia Tenggara menggambarkan isu-isu kompleks berkaitan dengan klaim kedaulatan nasional, hak untuk mengeksplorasi sumber daya alam, dan perlindungan hukum terhadap zona maritim, yang berdampak signifikan pada eksplorasi minyak dan gas serta dinamika keamanan maritim di kawasan Asia Tenggara memerlukan perhatian khusus dari ASEAN.

Asia Tenggara memiliki kepentingan strategis yang signifikan, terbukti dari perairannya yang kini berfungsi sebagai Jalur Komunikasi Laut (SLOC) untuk pelayaran internasional. Namun, nilai strategis ini juga membuat kawasan ini rentan terhadap berbagai ancaman keamanan yang meningkat, khususnya di ranah maritim, termasuk pembajakan, penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU), kejahatan transnasional (TNC), dan konflik perbatasan maritim. Perlu strategi hukum dan politik untuk disesuaikan dengan kondisi situasional (Zulhatra & Marsetio, p. 1, 2024). Posisi strategis Asia Tenggara sebagai Jalur Komunikasi Laut (SLOC) global menjadikannya kawasan vital namun rentan terhadap berbagai ancaman maritim, seperti pembajakan, IUU fishing, kejahatan transnasional, dan konflik perbatasan, sehingga memerlukan penanganan melalui strategi hukum dan politik yang adaptif terhadap dinamika kawasan.

Berbagai faktor, termasuk pertumbuhan ekonomi negara-negara besar di kawasan Indo-Pasifik, peningkatan kehadiran militer negara-negara kuat seperti China dan Amerika Serikat, serta adanya berbagai tantangan non-tradisional seperti pembajakan dan terorisme laut, membuat wilayah ini menjadi pusat perhatian dunia karena persaingan kekuasaan dan konflik wilayah, termasuk konflik di Laut China Selatan dan Selat Malaka. Ancaman non-tradisional, seperti pembajakan Somalia, dan ancaman terorisme yang terkait dengan aktivitas bajak laut dan kelompok teroris, merupakan tantangan tambahan. Secara umum, keamanan maritim di wilayah ini sangat berubah-ubah dan merupakan bagian penting dari upaya keamanan regional (Tertia & Perwita, 2018). Kawasan Indo-Pasifik, khususnya Laut Cina Selatan dan Selat Malaka, telah menjadi titik fokus perhatian global karena persaingan kekuatan besar, meningkatnya militerisasi, dan tantangan non-tradisional seperti pembajakan dan terorisme maritim, yang menjadikan keamanan maritim di kawasan dinamis ini penting bagi stabilitas regional.

Konflik geopolitik global, seperti ketegangan antara AS dan Cina, dan konflik regional di Laut Cina Selatan, memiliki dampak besar pada sektor maritim global. Ketegangan ini menyebabkan ketidakpastian dalam rute transportasi internasional, mengalir aliran perdagangan, dan memaksa perusahaan pelayaran untuk mengarahkan rute ke jalur yang lebih lama dan lebih mahal untuk menghindari zona berisiko tinggi. Akibatnya, biaya operasi,

termasuk asuransi dan transportasi, telah meningkat, tetapi berisiko terhadap keselamatan kapal dan kru - baik fisik maupun cyber. Sementara itu, ketegangan mendorong negara dan pemain bisnis untuk mendiversifikasi rantai pasokan mereka melalui strategi seperti "China +1" untuk mengurangi ketergantungan pada bidang -bidang yang rentan terhadap konflik. Selain itu, tekanan pada kepatuhan terhadap peraturan lingkungan dan sanksi internasional meningkatkan beban industri pelayaran global. Dengan demikian, konflik geopolitik tidak hanya mempersulit dinamika perdagangan maritim, tetapi juga mempercepat keterlambatan dalam logistik dan struktur ekonomi global dalam arti yang lebih luas (Maritime Fair Trade, 2023). Konflik geopolitik seperti antara AS dan Tiongkok berdampak besar pada sektor maritim dengan memicu gangguan rute pelayaran, lonjakan biaya operasional, dan risiko keamanan. Ketegangan ini juga mendorong diversifikasi rantai pasok dan memperbesar tekanan terhadap regulasi serta stabilitas logistik global.

KESIMPULAN DAN SARAN

Konflik maritim di Asia Tenggara menunjukkan betapa kompleks dan perlu perlindungan regional yang diperlukan disebabkan oleh posisi strategisnya sebagai rute transportasi internasional. Keluhan perbatasan, bajak laut, ikan ilegal, kejahatan kriminal dan ketegangan di Laut Cina Selatan menggambarkan tantangan serius terhadap kedaulatan dan yurisdiksi maritim. Situasi ini menjadi semakin rumit dengan keberadaan aktor non-negara, konflik lokal dan ketidaksepakatan antar negara mengenai klaim regional. Ketegangan geopolitik global, khususnya antara AS dan Cina, telah berkontribusi terhadap memburuknya situasi dengan mengganggu rute perdagangan, meningkatkan biaya operasional dan menimbulkan risiko terhadap keselamatan kapal, kru, dan infrastruktur logistik global.

Tantangan ini berarti bahwa pendekatan bersama dan diplomasi maritim adalah kunci untuk menjaga stabilitas regional. Keamanan maritim saat ini mencari pedoman yang tidak hanya mempengaruhi aspek militer, politik, ekonomi dan teknis, tetapi juga mempengaruhi mereka. Ada kebutuhan besar bagi ASEAN untuk memperkuat kerja sama regional, mengimplementasikan jaringan laut internasional seperti UNCLOS dan mengembangkan mekanisme solusi konflik yang efektif. Strategi yang komprehensif dan adaptif akan memungkinkan Asia Tenggara untuk mempertahankan keberlanjutan di sektor-sektor utama seperti perdagangan maritim dan pariwisata, dari efek konflik yang terus bertambah.

DAFTAR REFERENSI

- Barkech, Y. (2023, February). The diplomacy facing the new challenges of the digital revolution: An analysis of issues and opportunities.
- Bateman, S., Ho, J., & Raymond, C. Z. (2016). Introduction: Maritime conflict management, diplomacy and international cooperation. In S. Bateman, J. Ho, & C. Z. Raymond (Eds.), *Naval modernisation in Southeast Asia: Problems and prospects for small and medium navies* (pp. 1–10). Routledge. <https://research.vu.nl/en/publications/introduction-maritime-conflict-management-diplomacy-and-internati-2>
- Bueger, C. (2015). What is maritime security? *Marine Policy*, 53, 159–164. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.12.005>
- Dachi, E. T., Yurianto, M., & Purwanto. (2023). The Indo-Pacific context: Maritime security challenges and diplomacy of ASEAN countries. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 2(6), 1872–1881. <https://doi.org/10.55227/ijhess.v2i6.509>
- Jenne, N. (2023). Introduction: Maritime boundary disputes in Southeast Asia. *Melbourne Asia Review*, 14, 1–9. <https://doi.org/10.37839/mar2652-550x14.2>
- Kismartini, K., Yusuf, I. M., Sabilla, K. R., & Roziqin, A. (2024, April 5). A bibliometric analysis of maritime security policy: Research trends and future agenda. *Heliyon*, 10(8), e28988. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e28988>
- Levy, D., & Rettig, E. (2024). Confused seas: The current state of maritime affairs. *SSRN Electronic Journal*, 2, 1–7. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4742469>
- Lexiconology. (n.d.). International maritime disputes. <https://lexiconology.com/international-maritime-disputes/>
- Maritime Fairtrade. (2023, May 17). Trade war: The impact of geopolitical tensions on maritime. <https://maritimefairtrade.org/trade-war-the-impact-of-geopolitical-tensions-on-maritime/>
- Olason. (2024). Asia Pacific trade route. Behance. https://mir-s3-cdn-cf.behance.net/project_modules/1400/4a72ae36884601.572cdd0f100e6.jpg
- Poling, G. B. (2022, October 13). Southeast Asia's maritime security challenges: An evolving tapestry. Asia Maritime Transparency Initiative. <https://amti.csis.org/southeast-asias-maritime-security-challenges-an-evolving-tapestry/>
- Rani, H., Izzah, N., Nadzri, M., Nur, A., Mohd, Z., Zaini, A., Syamila, J., Nu'man, M., Haris, M., & Rani, A. (2025). Maritime boundary disputes in Southeast Asia: Legal frameworks, resource management and environmental impacts. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*. <https://doi.org/10.47772/IJRISS>
- Sicking, L. (2017). Introduction: Maritime conflict management, diplomacy and international law, 1100–1800. *Comparative Legal History*, 5(1), 2–15. <https://doi.org/10.1080/2049677X.2017.1314604>

- Tertia, J., & Perwita, A. A. B. (2018). Maritime security in Indo-Pacific: Issues, challenges, and prospects. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 14(1), 77–95. <https://doi.org/10.26593/jihi.v14i1.2795.77-95>
- U.S. Naval War College. (n.d.). South China Sea. U.S. Naval War College Library. <https://usnwc.libguides.com/SouthChinaSea>
- Valencia, M. J., Van Dyke, J. M., & Ludwig, N. A. (1999). *Sharing the resources of the South China Sea*. Martinus Nijhoff.